



MERDEKA: Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Presiden Soekarno di Bangsal Sitinggil Keraton Yogyakarta.

DOKUMENTASI BPAD DIY

70 TAHUN PERISTIWA YOGYA KEMBALI

Tentara Penjajah Tinggalkan Yogya

Yogyakarta memiliki peran istimewa bagi Republik Indonesia. Dari Yogyakarta, Republik Indonesia benar-benar bebas dari tentara penjajah Belanda. Itu terjadi pada 29 Juni 1949. Penarikan tentara penjajah itu dikoordinasi oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

PENARIKAN seluruh tentara penjajah Belanda dilakukan pasca disepakatinya Perjanjian Roem-Roijen. Tanpa terkecuali, seluruh pasukan Belanda ditarik keluar dari Yogyakarta. Tentara Nasional Indonesia (TNI) kemudian masuk ke Yogyakarta. Peristiwa ini dikenang sebagai Peristiwa Yogya Kembali.

Perundingan Roem-Roijen antara Republik Indonesia dan Belanda dilaksanakan sejak 14 April 1949 di Hotel Des Indes Jakarta dan ditandatangani 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Mohammad Roem. Pihak Belanda dipimpin Herman van Royen.

Perjanjian Roem-Roijen terkait erat dengan Serangan Oemoem (SO) 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini menunjukkan Republik Indonesia masih berdiri tegak. TNI dan rakyat berhasil mengalahkan pasukan Belanda dalam serangan selama sekitar enam jam di Yogyakarta. Raja Keraton Yogyakarta yang juga menjabat Menteri Negara Koordinator Keamanan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, memiliki peran penting dalam peristiwa ini. Selain Sultan HB IX, juga terlibat dalam peristiwa ini yakni Panglima Besar Jenderal Soedirman dan Letkol Soeharto.

Serangan besar-besaran yang dilancarkan tersebut berhasil menguasai Yogyakarta, yang merupakan ibukota Republik Indonesia. Saat itu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta, dan petinggi Republik Indonesia diasingkan Belanda di Bangka. Akibatnya, mereka tidak dapat menjalankan roda pemerintahan secara penuh.

Pasca Serangan Oemoem 1 Maret 1949, tentara Belanda ingin tetap menduduki Yogyakarta. Tapi, dunia internasional mendorong dilakukannya perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil sikap. Mereka memnutuskan perundingan antara kedua negara ditengahi oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI). UNCI merupakan pengganti Komisi Tiga Negara (KTN). UNCI terdiri wakil dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat.

Perundingan dilaksanakan di Jakarta mulai 14 April hingga 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr Mohammad Roem. Delegasi Belanda diketuai oleh Dr Herman Roijen Herman. Perundingan berlangsung alot. Delegasi Indonesia menuntut agar perundingan-perundingan selanjutnya baru diadakan setelah pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Ibukota Yogyakarta. Sedangkan pihak Belanda ingin pihak Republik Indonesia menghentikan perang gerilya terlebih dahulu.

Pada 6 Mei 1949, Mohammad Roem sempat menemui Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang berada di pengasingan di Bangka

untuk mengonsultasikan isi perjanjian yang akan disepakati. Soekarno dan Hatta menyatakan sepakat dengan isi pernyataan tersebut. Roem kembali ke Jakarta dan sehari kemudian menandatangani hasil perundingan tersebut.

Dalam perjanjian tersebut, delegasi Republik Indonesia menyatakan bersedia melakukan tiga hal. Pertama, mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Kedua, bekerja sama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Ketiga, turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan Negara Indonesia Serikat tanpa syarat apapun.

Delegasi Belanda juga menyatakan sepakat. Mereka bersedia melaksanakan lima butir perjanjian. Pertama, menyetujui kembalinya Pemerintahan RI ke Yogyakarta. Kedua, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Ketiga, tidak mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum 19 Desember 1948. Keempat, menyetujui keberadaan Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. Kelima, berusaha menggelar KMB segera diadakan setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Berdasar perjanjian tersebut, seluruh pasukan Belanda lantas ditarik dari Yogyakarta. Penarikan tersebut dilaksanakan pada 29 Juli 1949.

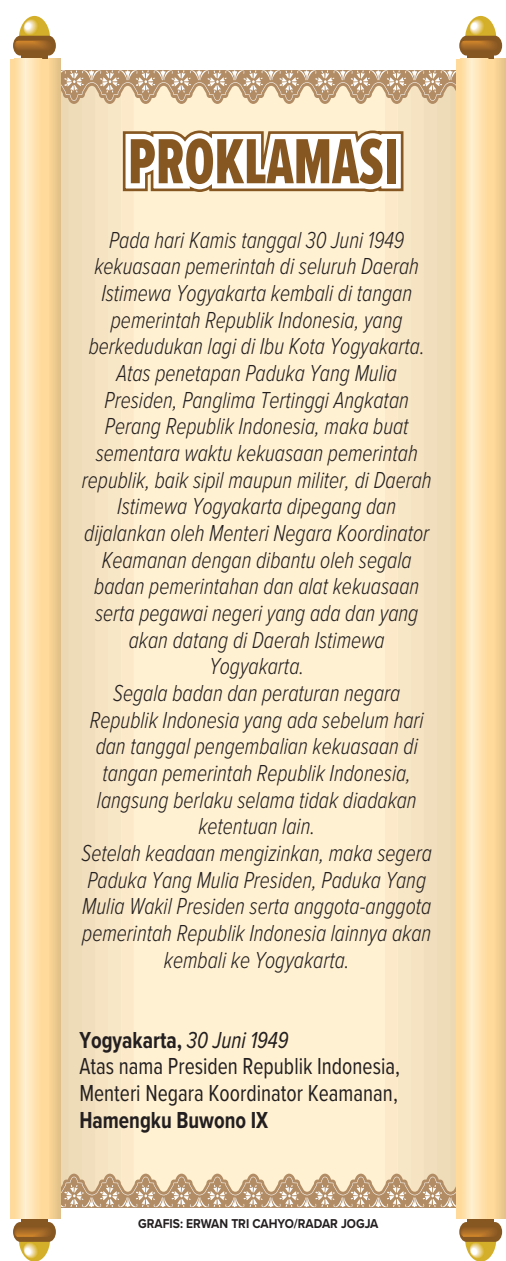
Pasukan Belanda meninggalkan Yogyakarta melalui Stasiun Tugu. Sultan HB IX bertindak sebagai wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Pasukan Belanda diangkut kereta api dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Dalam penarikan ini, Sultan HB IX didampingi Letkol Soeharto dan Mayor Sarjono.

Pada hari itu, seluruh pasukan Belanda benar-benar meninggalkan Yogyakarta. Lantas, meninggalkan Indonesia.

Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Wapres Moh Hatta yang berada di Bangka kembali ke Yogyakarta. Mereka menuju Yogyakarta dengan menumpang pesawat terbang.

Empat hari berselang, 10 Juli 1949, Jenderal Soedirman memasuki Yogyakarta. Sebelumnya, dia memimpin perang gerilya. Jenderal Soedirman dan pasukannya disambut Sultan HB IX, yang disertai Letkol Soeharto.

Setelah itu, Jenderal Soedirman diterima oleh Presiden Soekarno dan Wapres Moh Hatta di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, hadir pula Letkol Soeharto dan Kolonel TB Simatupang. Ada pula dua ajudan Jenderal Soedirman yakni Kapten Soeparjo Roestam, dan Mayor Soeadi. (*amd/fj)



Sebelum Belanda Datang, Yogyakarta Sudah Teratur

"**SEBELUM** Belanda datang, Yogyakarta sudah teratur. Kalau sekarang menjadi kacau, mengapa saya yang harus memperbaikinya? Kalau Tuan ingin memperlakukan keraton seperti ketika tentara Belanda merampas semua arsip-arsip saya di Kepatihan, lebih baik bunuh saya terlebih dahulu.

Pernyataan tersebut dilontarkan Sri Sultan HB IX kepada pimpinan pasukan Belanda. Penyataan tegas tersebut membuat ciut nyali pimpinan Belanda. Pasukan Belanda tidak berlutur. Mereka berdalih datang untuk Sultan HB IX. Tak lama berselang, pasukan Belanda mundur.

Perundingan Roem-Roijen antara pemerintah Indonesia dan Belanda dilaksanakan. Salah satu isi perjanjian itu adalah menyerahkan kembali pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Saat itulah, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Sultan HB IX untuk memegang tampuk kekuasaan pemerintahan Indonesia. Surat penetapan ini dikeluarkan 1 Mei 1949 di Bangka, tempat pengasingan Soekarno.

Sebagai kepala Negara, Sultan HB IX langsung merapikan struktur organisasi pemerintahan. Sultan HB IX membangun kembali Kepolisian Negara.

Selain itu, Sultan HB IX juga mengatur penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta. Termasuk menyiapkan seremonial penyambutan kembalinya pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dari pengasingan di Yogyakarta. Tak terkecuali, kembalinya pula Panglima Besar Soedirman dari perang gerilya.

Selang hari pasca Peristiwa Yogya Kembali atau 30 Juni 1949, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengambil sebuah langkah penting. Memegang amanah sebagai Menteri Negara Koordinator Keamanan, Sultan HB IX mengeluarkan Proklamasi di Yogyakarta. Proklamasi ini mengu-

atkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan Soekarno dan Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.

Proklamasi Kemerdekaan di Yogyakarta ini merupakan langkah supaya tidak terjadi kesogongan pemerintahan. Sebab, saat itu Soekarno, Hatta, dan para pimpinan lainnya tidak berada di Yogyakarta karena diasingkan oleh Belanda.

Dalam proklamasi tersebut, Sultan HB IX menegaskan kekuasaan pemerintah di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta kembali di tangan pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan lagi di Ibu Kota Yogyakarta. Atas penetapan Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, maka buat sementara waktu kekuasaan pemerintah republik, baik sipil maupun militer, di Daerah Istimewa Yogyakarta dipegang dan dijalankan oleh Menteri Negara Koordinator Keamanan dengan dibantu oleh segala badan pemerintahan dan alat kekuasaan serta pegawai negeri yang ada dan yang akan datang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, proklamasi itu juga menyebutkan segala badan dan peraturan negara Republik Indonesia yang ada sebelum hari dan tanggal pengembalian kekuasaan di tangan pemerintah Republik Indonesia, langsung berlaku selama tidak diadakan ketentuan lain. Setelah keadaan mengizinkan, maka segera Paduka Yang Mulia Presiden, Paduka Yang Mulia Wakil Presiden serta anggota-anggota pemerintah Republik Indonesia lainnya akan kembali ke Yogyakarta.

Peristiwa Yogya Kembali pada 29 Juni 1949 merupakan salah satu tonggak kukuhnya Republik Indonesia. Peristiwa itu tak hanya menandai penarikan seluruh pasukan penjajah Belanda. Peristiwa tersebut sekaligus meneguhkan keberadaan Republik Indonesia. (*amd/fj)

Pengikat Pemersatu Bangsa

PERISTIWA Yogya Kembali wajib dikenang oleh seluruh masyarakat. Sebab, peristiwa tersebut memiliki makna besar bagi Republik Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan Yogyakarta sejak awal sudah berkomitmen terhadap Republik Indonesia. Selain itu, Peristiwa Yogya Kembali dapat dijadikan pengikat pemersatu bangsa.

Peristiwa Yogya Kembali tak lepas dari Serangan Oemoem 1 Maret 1949. "Serangan Oemoem 1 Maret 1949 mengisyaratkan Republik Indonesia secara *de facto* masih eksis, dan proklamasi kedua menyatakan Republik Indonesia secara *de jure* tetap berdaulat," jelasnya.

Proklamasi kedua tersebut merujuk pada Proklamasi yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koordinator Keamanan Republik Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada 30 Juni 1949. Melalui Proklamasi Kedua ini, kedaulatan Indonesia secara *de facto* dan *de jure* dirancang untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia.

"Presiden (Soekarno) ditahan di Bangka. Kepala PDRI Mr Syafruddin Prawiranegara, yang pindah-pindah di Sumatera Barat. Proklamasi diucapkan Sri Sultan HB IX di Yogyakarta, ini



RADAR JOGJA FILE

TINGGALKAN YOGYAKARTA: Diorama di Museum Yogya Kembali yang menggambarkan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia dalam proses penarikan pasukan Belanda di Stasiun Tugu Yogyakarta pada 29 Juli 1949. Sultan HB IX didampingi Letkol Soeharto dan Mayor Sarjono.

menunjukkan kelapangan dada dan kebesaran hati para pendahulu kita," jelas HB IX.

Peristiwa Yogya Kembali juga merupakan bagian tak terpisahkan dari rentetan peristiwa sejarah mempertahankan kedaulatan Indonesia. Terhitung sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga kembalinya kedaulatan penuh pada 17 Agustus 1950.

Peristiwa Yogya Kembali merupakan mata rantai tonggak sejarah sebelum dan sesudahnya.

Yakni, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, Amanat 5 September 1945, Jogja Ibukota Republik 4 Januari 1946, Serangan Oemoem 1 Maret 1949, Yogya Kembali 29 Juni 1949, kembalinya Ibukota RI ke Jakarta 27 Desember 1949, serta utuhnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh sejak 17 Agustus 1950. "Tekad Suwargi HB IX dan rakyat Jogja untuk bergabung dengan NKRI tidak hanya dibuktikan dengan Amanat 5 September 1945 itu saja," ujar HB X. (*amd/fj)